UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Asas aman dalam proses penerbitan sertipikat hak milik bersama Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten
Musi Rawas Utara dan implikasi hukumnya**
Dadang Fernando, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Chomzah, Ali. *Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan II)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.

Bonsu, Benny. *Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium).* Jakarta: Mediatama Saptakarya, 1997.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi revisi.* Jakarta: Djambatan, 2003.

Ismail, Nurhasan. Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah: Teori dan Praktik. Malang: Setara Press, 2024.

Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Adat di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013.

Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997.* Bandung: Mandar Maju, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

_____. *Ilmu Hukum. Bandung*: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramelan, Eman. *Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Pertanahan di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 2018.

Ramadhani, Rahmat. *Buku Ajar Hukum Pertanahan.* Medan: UMSU Press, 2024.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Cetakan ke-6.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

_____.*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Asas aman dalam proses penerbitan sertipikat hak milik bersama Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Musi Rawas Utara dan implikasi hukumnya
Dadang Fernando, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Setiawan, Ahmad. *Hukum Pertanahan Nasional: Sejarah dan Politik Hukum Pertanahan, Hak Menguasai Negara, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.* Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2022.

Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Sumardjono, Maria S.W. *Hak Komunal atas Tanah.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

_____. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2006.

_____. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Edisi revisi*. Yogyakarta: Bahan Kuliah Universitas Gadjah Mada, 2019.

_____. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.* Jakarta: Kompas, 2008.

Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van het Adatrecht),* terj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, direvisi oleh Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2021.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Asas aman dalam proses penerbitan sertipikat hak milik bersama Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten
Musi Rawas Utara dan implikasi hukumnya**
Dadang Fernando, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172, Sekretariat Kabinet, 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126, Sekretariat Negara, 2023.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.

C. Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi

Sadewo, Ari. “Analisis Hukum Terkait Status Kepemilikan Tanah Adat Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tual.” (Tesis) Universitas Hasanuddin, 2022.

Dessy, Fitrida Joniwen Putri. Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari yang Dijadikan sebagai Perkebunan Plasma Kelapa Sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. (Tesis), Universitas Andalas, 2016.

Qiftiah, Rabiatul. Rekonstruksi Regulasi Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang Berbasis Nilai Keadilan. (Disertasi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hukum Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat” (Disertasi) Universitas Sumatera Utara, 2010.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Asas aman dalam proses penerbitan sertipikat hak milik bersama Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten
Musi Rawas Utara dan implikasi hukumnya**
Dadang Fernando, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wahyuni, Sri. Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Adat yang Berbasis Nilai Keadilan Martabat. (Tesis) , Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2023.

D. Jurnal

Aditya, Trias, Eva Maria-Unger, Christelle vd Berg, Rohan Bennett, Paul Saers, Han Lukman Syahid, Doni Erwan, Tjeerd Wits, Nurrohmat Widjajanti, Purnama Budi Santosa, Dedi Atunggal, Imam Hanafi, dan Dewi Sutejo. "Participatory Land Administration in Indonesia: Quality and Usability Assessment." *Land*, Volume 9, Nomor 3 (2020).

Akbar Johamran P., Andi Muhammad Al Ilham, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas. "Efektivitas Pengelolaan Data Fisik dan Data Yuridis Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Living Law*, Volume 3, Nomor 2 (2022).

Bere, Nopriano, Agnes Quartina Pudjiastuti, dan Jatmiko Setiaji. "Analisis Kinerja Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Jatiwaringin Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian*, Volume 6, Nomor 2 (2024).

Dimas, Rionald. "Publikasi Pendaftaran Tanah di Negara Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum." *Prosiding Serina*, Volume 1, Nomor 1 (2021).

Gunawan, Jasardi. "Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 1 (2018).

Gunawan, Yoga, Bias Lintang Dialog, dan Diana Fitriana. "Land Dispute Resolution: Village Deliberation and Consensus to Establish Public Order." Unifikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2 (2023).

Guntur, I Gusti Nyoman. "Ragam Pengakuan Formal terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia." *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 6, Nomor 2 (2023).

Hapsari, Sawin Dwi. "Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris dan Itikad Baik dalam Peralihan Hak Atas Tanah sebagai Dasar Pembuktian bagi Pemiliknya." *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 1 (2017).

Hidayatullah, Yarief, Surahman, dan Muhammad Nurcholis Alhadi. "Juridical Analysis of Violation of Core-Plasma Partnership Agreement of Palm Oil Plantation Between PT Hardaya Inti Plantation and Plasma

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Asas aman dalam proses penerbitan sertipikat hak milik bersama Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten
Musi Rawas Utara dan implikasi hukumnya**
Dadang Fernando, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Amanah Farmers Cooperative." *LITERACY,* Volume 4, Nomor 1 (2025).

Kawamura, R. "Traditional Land Rights and Agrarian Reform: The Case of Southeast Asia." *Asian Journal of Law and Society*, Volume 6, Nomor 2 (2019).

Lakuteru, Venti Arista. "Kedudukan Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria dan Hukum Adat di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,* Volume 13, Nomor 11 (2025).

Lanini, Agus, Fatimah Maddusila, Sulbadana, Lembang Palipadang. "The Unequal Contract of Nucleus-Plasma Regarding Palm Oil in Central Sulawesi." *International Journal of Law, Government and Communication,* Volume 6, Nomor 22 (2021).

Manthovani, Reda, dan Istiqomah. "Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia,* Volume 2, Nomor 2 (2017).

Naufalian, Hafizh, Moh. Dandi Putra Susendi, dan Olivia Zahra Yuwono. "Pengaruh Hukum Adat terhadap Kebijakan Reformasi Agraria di Indonesia." Majelis: *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2 (2025).

Nuralifah, Asriyanti. "Keabsahan Sertifikat dari Perbedaan Jangka Waktu Publisitas dalam Pendaftaran Tanah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1 (2021).

Ramadhani, Rahmat. "Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 2, Nomor 1 (2017).

Sahono, Linda S.M. "Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Perspektif*, Volume 17, Nomor 2 (2012).

Salam, Safrin. "Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Komunal sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria." *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 2 (2016).

Sumilat, Rohyani Rigen Is. "Implementasi Permen ATR/BPN No. 14/2024." Santhet: *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 2 (2024).

Syukrisna, Dwi Anang, Rosita Candrakirana, dan Diana Lukitasari. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024." *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 4, Nomor 12 (2025).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Asas aman dalam proses penerbitan sertipikat hak milik bersama Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Musi Rawas Utara dan implikasi hukumnya
Dadang Fernando, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3 (2013).

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2 (2014).

Wulandari, Yunita Adinda, dan Sri Wahyu Handayani. "Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn*, Volume 3, Nomor 5 (2025).

E. Artikel

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Menteri ATR/BPN Selesaikan Sengketa Tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas." 12 April 2023. Dikutip dalam VOI, 12 April 2023.

Maria S.W. Sumardjono. "Ihwal Hak Komunal atas Tanah." Arsip Jaringan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bersumber dari Kompas, 6 Juli 2015.

M. Agus Yozami. "Begini Bentuk Tim Reforma Agraria Nasional Seperti Diatur Perpres 86/2018." Hukumonline, 10 Oktober 2018.

Hukumproperti.com. "Pendaftaran Tanah Ulayat: Pengakuan dan Perlindungan Hukum." Diakses 1 Mei 2026. https://hukumproperti.com/pendaftaran-tanah-ulayat/

Antara News. "Menteri ATR/BPN Selesaikan Sengketa Tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas." Diakses 5 Mei 2026. https://www.antaranews.com/berita/3484752/menteri-atrbpn-selesaikan-sengketa-tanah-suku-anak-dalam-musi-rawas

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Terobosan Hukum Baru Proses Pengadministrasian Pendaftaran Tanah Ulayat." Diakses 1 Mei 2026. https://polkam.go.id/terobosan-hukum-baru-proses-pengadministrasian-pendaftaran-tanah-ulayat/

Fitri Nabila Aulia. Pendaftaran Tanah Ulayat: Pengakuan dan Perlindungan Pemerintah bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Diakses 5 Mei 2026. https://blog.lekslawyer.com/registration-of-ulayat-rights/